KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ibu Kota Negara: RP 23,9 Triliun untuk IKN, Infrastruktur Dominan
Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

IBU KOTA NUSANTARA

Rp 23,9 Triliun untuk IKN, Infrastruktur Dominan

JAKARTA, KOMPAS — Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 23,9 triliun untuk penyiapan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Terkait hal ini, pemerintah diingatkan menimbang secara sungguh-sungguh agar jangan ada program lebih penting yang dikorbankan untuk anggaran IKN.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (17/1/2023), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, program kerja Kementerian PUPR pada 2023, di antaranya untuk mendukung pembangunan IKN.

Merujuk materi paparan Kementerian PUPR yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut, disiapkan untuk dukungan IKN Rp 10,38 triliun yang diambil dari anggaran di bidang Cipta Karya yang mencapai Rp 25,03 triliun. Selain itu, disiapkan pula Rp 1,12 triliun untuk IKN yang diambil dari anggaran di bidang sumber daya air yang totalnya Rp 41,95 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai sidang kabinet paripurna terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1), menyampaikan, pemerintah menyiapkan belanja untuk IKN sebesar Rp 23,9 triliun, dengan Rp 21 triliun di antaranya untuk infrastruktur.

"Belanja di dalam rangka IKN Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," kata Menkeu.

Target prioritas 2023 di bidang Cipta Karya, antara lain pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum. Hal ini termasuk instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum Sepaku di Kalimantan Timur, demi mendukung IKN.

Selain itu juga pembangunan instalasi pengolahan air limbah serta tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung IKN. Berikutnya adalah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Program penting

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal menuturkan, apabila melihat target pembangunan IKN, banyak yang perlu dikejar, terutama di sisi infrastruktur dasar dan bangunan. "Terlepas dari itu, rancangan IKN dibangun pada kondisi prakrisis. Jadi, memang, melihat dinamika setelah perencanaan itu dibuat, ada krisis, ada pandemi, dan sekarang ada inflasi, ada permasalahan-permasalahan yang tidak terpikirkan atau tidak terkirakan atau terprediksikan pada saat itu berarti memang perlu fleksibilitas atau penyesuaian dengan kondisi," ujar Faisal.

Dilihat dari kemampuan anggaran, Faisal menuturkan, dari dulu memang ada keterbatasan. Namun, keterbatasan di 2023 menjadi lebih terasa karena pada saat sama ada target normalisasi kebijakan fiskal, yakni mencapai defisit di bawah 3 persen. Ada kekhawatiran normalisasi kebijakan fiskal ini berdampak ke sektor riil karena banyak insentif yang diberikan di saat pandemi dikurangi atau distop pada 2023.

"Jadi, intinya, perlu fleksibilitas terhadap program-program yang tidak urgen, termasuk pada IKN. Jadi, memang perlu banyak perubahan karena kalau tidak, ada kepentingan yang lebih urgen yang justru dikorbankan. Hal yang lebih urgen harus lebih didahulukan," kata Faisal. (CAS)